LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

https://bpkad.sumselprov.go.id
bpkad2.sumselprov@gmail.com
bpkad_provsumsel
(0711) 5736539

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% $\leq$ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% $\leq$ 90%	Tinggi
3.	66% $\leq$ 75%	Sedang
4.	51% $\leq$ 65%	Rendah
5.	$\leq$ 50%	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target Renja dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	-
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	Sangat Tinggi
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, LRA *Unaudited* TA. 2025.

Berdasarkan tabel 3.2 Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan, saat ini masih dalam proses penyusunan laporan keuangan. Adapun semua indikator dari sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan capaian indikator kinerja tertinggi dicapai pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset sebesar 103,26%. Pada Indikator Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan mencapai 100% dan Indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) mencapai 94,63%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2025 sama seperti capaian target pada tahun 2024, yaitu memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator* : *Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A. 1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD merupakan dua instrumen hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berikut pencapaian kinerja penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai APBD Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.3
Penetapan Dokumen APBD

Indikator		Batas Waktu sesuai Peraturan	Realisasi	Pencapaian Indikator	Nomor Perda/Pergub
Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.					
a.	Perubahan APBD TA. 2025	Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2025	19 September 2025	Tepat Waktu	Perda No. 3 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 dan Pergub No. 30 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025
b.	APBD TA. 2026	paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;	30 Desember 2025	Tepat Waktu	Perda No. 8 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 dan Pergub No. 49 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan. Proses penyusunan APBD pada tahun anggaran 2025 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siklus penyusunan APBD.

Indikator : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) merupakan salah satu indikator kinerja keuangan daerah yang krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator ini mengukur kredibilitas perencanaan anggaran belanja dan konsistensi antara perencanaan awal dengan realisasi. Semakin kecil nilai deviasi (mendekati 0), semakin baik kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah. Meskipun tidak ada angka mutlak, deviasi yang tinggi dapat menjadi catatan auditor BPK. Dalam konteks IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), deviasi yang diperkenankan biasanya berada pada kisaran 5%.

Deviasi yang rendah (kurang dari atau sama dengan 5%) menunjukkan perencanaan yang matang. Deviasi yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah akurat dalam merencanakan dan disiplin dalam mengeksekusi. Hal ini meningkatkan kepercayaan BPK terhadap keandalan laporan keuangan daerah. **Sementara** BPK melihat deviasi yang tinggi **(lebih dari 5%)** sebagai tanda **perencanaan yang buruk** atau **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** yang lemah, yang dapat mempengaruhi opini **WTP**.

Oleh karena itu, WTP memerlukan laporan keuangan yang andal. Deviasi yang rendah menunjukkan bahwa perencanaan anggaran disusun dengan baik dan terealisasi sesuai rencana, yang mencerminkan sistem pengendalian internal yang kuat. Adapun Jika deviasi antara rencana dengan realisasi belanja terlalu tinggi (terutama jika realisasi jauh di bawah pagu), hal ini dapat berakibat :

- Rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran;
- Potensi temuan pemeriksaan BPK mengenai kelemahan perencanaan
- Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar, yang dapat dinilai tidak efisien.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan perhitungan dengan menggunakan rumus:

$$\left\{\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right)^{\blacktriangleright} -1\right\} \text{x} \quad 100\%$$

$$= \left\{\frac{9.690.237.627.574,89}{10.349.496.422.262,00} \text{ x } 100\%\right\}$$

= 93,63

= 100 - 93.63

= 6,37

= **5.37 (6.37-1)**

Data Realisasi yang digunakan adalah Data Unaudited

Keterangan :

- **Pembilang**

  Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi adalah nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus.

- **Penyebut**

  Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.

Berdasarkan perhitungan di atas, Jika dilihat dari Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan capaian kinerja sebesar 5,37%. Capaian ini masih belum optimal, jika dibandingkan dengan target yang akan ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%. Namun jika dibandingkan dengan deviasi pada tahun 2024 realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengalami minus sebesar 2,87%, hal ini dikarenakan adanya penyerapan anggaran yang lebih besar dari perencanaan awal.

Adapun Kondisi keuangan daerah Tahun 2025, terutama dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah dan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah lainnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap realisasi capaian indikator ini.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator* : *Indeks Pengelolaan Aset

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan rumus:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan Produktif

   ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2

2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan

   ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2

3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif

   ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2

4. Administrasi BMD yang Andal

   ST.4.2 = NP.4.8.2

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah instrumen pengukuran kinerja untuk menilai sejauh mana sebuah instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah mengelola Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) secara akuntabel, produktif, dan sesuai regulasi. Berikut Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 3.4** dibawah :

Tabel 3.4
PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No.	Parameter	Data		Nilai Parameter	FPK	Indeks Sebelum Bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot		Bobot	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Sasaran Strategis : Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif (ST.1.2)**									**0,53**
	ST.1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2									
	a. Parameter 1 : Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (NP.1.1.2) bobot 10%.					Indeks NP.1.1.2 Sebelum Bobot			Bobot NP.1.1.2	**Indeks NP.1.1.2**
	NP.1.1.2 = {(SP.1.1.1.2 x 70%) + (SP.1.1.2.2 x 30%)} x 10 %					(1) = SP.1.1.1.2 + SP.1.1.2.2			(2)	(3) = (1) x (2)
						1,30			10%	**0,13**
	1) Subparameter 1 : Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.2) (Bobot 70%)									0,7
	Subparemeter	Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di Provinsi 2023..(1)	Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD Provinsi 2023...(2)	% SP.1.1.1.2	FPK	Indeks SP.1.1.1.2 sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (6)		Bobot SP.1.1.1.2	*Indeks SP.1.1.1.2*
							Nilai	Uraian		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6) =(4)X(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)x(9)
	SP.1.1.1.2	2.139.993.856.918	24.402.680.230.278	8,77%	80%	7,02%	1	Buruk	70%	0,7
	2) Subparamater 2 : Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.2.2)									0,6
	Subparemeter	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Provinsi 2023..(1)	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD pada Provinsi 2023..(2)	% SP.1.1.2.2	FPK	Indeks SP.1.1.2.2 sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (6)		Bobot SP.1.1.2.2	*Indeks SP.1.1.2.2*
							Nilai	Uraian		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6) =(4)X(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)x(9)
	SP.1.1.2.2	14	85	16,47%	80%	13,18%	2	Cukup	30%	0,60

b. Parameter 2 : Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (NP.1.2.2) bobot 10%. ***0,40***

Paremeter	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi 2023....(1)	Target penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi 2023....(2)	% NP.1.2.2	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (4)		Bobot NP.1.2.2	**Indeks NP.1.2.2**
				Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(7)
NP.1.2.2	5.338.065.425	5.283.000.000	101,04%	4	Sangat Baik	10,00%	**0,40**

2 Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangann (ST.2.2) **0,86**

ST .2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2

a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penetapan RKBMD (NP.2.3.2) bobot 5 %. **0,05**

Paremeter	Batas Penetapan RKBMD 2023	Tanggal Penetapan RKBMD	Nilai Kategori Indeks Sebelum Bobot Pada Angka (3)		Bobot NP.2.3.2	**Indeks NP.2.3.2**
			Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)x(6)
NP.2.3.2	Minggu ke empat bulan Juni	Tidak ditetapkan	1	Buruk	5%	**0,05**

b. Parameter 4 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD (NP.2.4.2) bobot 15%.

Indeks NP.2.4.2 Sebelum Bobot	Bobot NP.2.4.2	**Indeks NP.2.4.2**
(1) = (SP.2.4.1.2 + SP.2.4.2.2)/2	(2)	(3) = (1) x (2)
2,70	15%	**0,41**

1) Subparameter 1 : Laporan Semester I Penatausahaan BMD (SP.2.4.1.2) *0,90*

Nilai subparameter penyampaian laporan Semester I, diukur terhadap jumlah Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan Semester I tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke empat bulan Juli

Subparemeter	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD semester I tepat waktu di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Jumlah Pengguna Barang di Provinsi 2023..(2)	% SP.2.4.1.2	FKP	Nilai Kategori Indeks Pada Angka (4)		*Indeks SP.2.4.1.2*
					Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8)=(5) X (6)
SP.2.4.1.2	21	40	**53%**	90%	1	Buruk	0,90

2) Subparameter 2 : Laporan sampai dengan Semester II Penatausahaan BMD (Akhir Tahun) (SP.2.4.2.2) *1,80*

Nilai subparameter penyampaian laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun), diukur jumlah Pengguna Barang yang telah meyerahkan laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun) tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke dua bulan Pebruari tahun berikutnya.

Subparemeter	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD sampai dengan semester II (akhir tahun) tepat waktu pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Jumlah Total Pengguna Barang pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	% SP.2.4.2.2	FKP	Nilai Kategori Indeks Pada Angka (4)		*Indeks SP.2.4.2.2*
					Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8)=(5) X (6)
SP.2.4.2.2	25	40	**63%**	90%	2	Cukup	1,80

c. Parameter 5 : Ketepasan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (NP.2.5.2) bobot 10 %. ***0,40***

Jumlah Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu yaitu minggu keempat bulan Pebruari tahun berikutnya.

Paremeter	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu pada Provinsi 2023.(1)	Jumlah Total Pengguna Barang pada Provinsi 2023..(2)	% NP.2.5.2	Nilai Kategori Indeks Sebelum Bobot Pada Angka (4)		Bobot NP.2.5.2	**Indeks NP.2.5.2**
				Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(7)
NP.2.5.2	**40**	40	100%	**4**	**Sangat Baik**	10%	0,40

3 Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (ST.3.2) **0,68**

ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2

a. Parameter 6 : Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (NP.3.6.2) bobot 15%. ***0,30***

Paremeter	Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan 2023 pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Total jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan Tahun 2023 (Saldo akumulasi jumlah rekomendasi) pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	% NP.3.6.2	Nilai Kategori Indeks Sebelum Bobot pada Angka (4)		Bobot NP.3.6.2	**Indeks NP.3.6.2**
				Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(7)
NP.3.6.2	153	253	60%	2	CUKUP	15%	0,30

b. Parameter 7 : Tindak lanjut Pengelolaan BMD (NP.3.7.2) bobot 20%.

Indeks NP.3.7.2 Sebelum Bobot	Bobot NP.3.7.2	**Indeks NP.3.7.2**
(1) = (SP.3.7.1.2 + SP.3.7.2.2 + SP.3.7.3.2	(2)	(3) = (1) x (2)
1,9	20%	***0,38***

1) Subparameter 1 : Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD (SP.3.7.1.2) bobot 30%. 1,20

Subparemeter	Jumlah BMD atas pemanfaatan,pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan yang telah ditindaklanjuti pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah dikeluarkan pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	% SP.3.7.1.2	FPK	Indeks SP.3.7.1.2 Sebelum Bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (6)		Bobot SP.3.7.1.2	*Indeks SP.3.7.1.2*
						Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)x(9)
SP.3.7.1.2	18	18	100%	90%	90,0%	4	Sangat Baik	30%	1,2

2) Subparameter 2 : Tindak lanjut BMD Rusak Berat /Usang (SP.3.7.2.2) 0,40

Subparemeter	Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan 2023 pada Provinsi	Saldo awal BMD kondisi rusak berat/usang ditambah mutasi tambah BMD kondisi rusak berat/usang 2023 pada Provinsi.	% SP.3.7.2.2	FPK	Indeks SP.3.7.2.2 Sebelum Bobot	Nilai Kategori Indeks Sebelum Bobot pada angka (6)		Bobot SP.3.7.2.2	*Indeks SP.3.7.2.1*
						Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)x(9)
SP.1.1.2.2	7.976.888.000	**701.595.279.855**	0,01	90%	1,02%	1	buruk	0,4	0,4

3) Subparameter 3 : Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan (SP.3.7.3.2) 0,30

Subparemeter	Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindak lajuti sampai dengan 2023 pada Provinsi	Saldo awal KDP ditambah mutasi tambah KPD 2023 pada Provinsi. Kabupaten/Kota	% SP.3.7.3.2	FPK	Indeks SP.3.7.3.2 sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (6)		Bobot SP.3.7.3.2	*Indeks SP.3.7.3.2*
						Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)x(9)
SP.3.7.3.2	50.572.380.231,90	**244.538.340.888,22**	**21%**	90%	**18,61%**	1	buruk	30%	0,30

4 **Sasaran Strategis : Administrasi BMD yang Andal (ST.4.2)** **0,15**

ST.4.2 = NP.4.8.2

Parameter 8 : Sertifikasii dokumen kepemilikan BMD (NP.4.8.2) bobot 15%.

Indeks NP.4.8.2 Sebelum Bobot	Bobot NP.4.8.2	**Indeks NP.4.8.2**
(1) = SP.4.8.1.2 + SP.4.8.2.2	(2)	(3) = (1) x (2)
1,000	15%	***0,15***

1) Subparameter 1 : Jumlah bidang yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.1.2) 0,50

Subparemeter	Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan Tahun 2023 pada Provinsi Sumatera Selatan	Total jumlah bidang tanah sampai dengan Tahun 2023 pada Provinsi Sumatera Selatan	% SP.3.8.1.2	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (4)		Bobot SP.4.8.1.2	*Indeks SP.4.8.1.2*
				Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(7)
SP.3.8.1.2	292	2.298	12,707%	1	Buruk	50%	0,5

2) Subparameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.4.8.2.1) 0,50

Subparemeter	Nilai perolahan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan 2023 pada Provinsi ...(1)	Total nilai perolehan tanah sampai dengan 2023 pada Provinsi ....(2)	% SP.3.8.2.2	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (4)		Bobot SP.4.8.2.2	*Indeks SP.4.8.2.2*
				Nilai	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(7)
SP.3.8.2.2	3.408.189.428.721	13.010.288.120.805	0,26	1	Buruk	50%	0,5

NILAI INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) **2,22**

KONVERSI NILAI INDEKS PENGELOLAAN ASET DALAM KATEGORI **BAIK**

Capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 sebesar 2,22% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan indeks 2,15% atau meningkat sebesar 103,26%. Bahwa semakin tinggi capaian indeks menunjukkan pengelolaan aset yang baik. Penetapan Nilai IPA diharapkan dapat memotivasi untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset.

2. Ikhtisar perbandingan realisasi capaian Kinerja terhadap target Renja BPKAD Tahun 2025

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan secara antara realisasi kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2025 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar perbandingan realisasi capaian Kinerja terhadap target Renja BPKAD Tahun 2025 :

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENJA	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	Proses Penyusunan Laporan Keuangan
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	Tercapai
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	Belum Tercapai
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	Tercapai

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Opini BPK atas Laporan Keuangan : Target Renja menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada saat laporan ini disusun, status capaian masih berada dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan, sehingga angka realisasi akhir dan persentase capaian belum ada capaian.
- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu : BPKAD berhasil mencapai hasil maksimal sebesar 100% dari target Renja 100% dengan status Tercapai. Keberhasilan ini menunjukkan kepatuhan penuh instansi terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam siklus penganggaran daerah.
- Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD (Budget Execution): Target Renja menetapkan batas deviasi maksimal sebesar 5%. Namun, realisasi deviasi akhir tahun tercatat sebesar 5,37%. Kondisi ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 94,63% dengan status Belum Tercapai.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- **Indeks Pengelolaan Aset:** Indikator ini mencatatkan hasil yang sangat positif. Dari target Renja yang ditetapkan sebesar **2,15%**, BPKAD berhasil merealisasikan indeks hingga **2,22%**. Keberhasilan ini membuat persentase capaian melonjak hingga **103,26%** dengan status **Tercapai (Melampaui Target)**.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan **tabel 3.8** di bawah, Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada lima tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Opini BPK sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target yang di tetapkan yaitu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Capaian indikator sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari penganggaran yang baik, penatausahaan yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan aset yang baik dan APBD Kabupaten/Kota yang baik dengan rata rata capaian kinerja sudah mencapai 97%.

a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)

Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) tahun 2021 s.d tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution) Tahun 2021-2025

TAHUN	ANGGARAN INDUK	REALISASI	BUDGET EXECUTION
2021	10.729.096.013.693,00	10.060.730.260.979,40	5,23%
2022	9.766.471.031.458,00	9.663.575.726.750,69	0,05%
2023	10.511.755.061.412,00	9.653.373.230.507,08	7,17%
2024	10.501.712.113.782,00	10.908.424.497.431,90	-2,87%
2025	10.349.496.422.262,00	9.690.237.627.574,89	5,37%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan deviasi terendah pada Tahun 2022 sebesar 0,05%. Sedangkan Tahun 2021 dan Tahun 2025 deviasi mencapai angka diatas 5%, deviasi tertinggi pada tahun 2023 yaitu mencapai 7,17%. Sementara itu, tahun 2024 realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengalami minus sebesar 2,87%, hal ini dikarenakan adanya penyerapan anggaran yang lebih besar dari perencanaan awal.

Pada tabel diatas, jika dibandingkan dengan perencanaan awal maka penyerapan anggaran belum optimal atau belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang akan menetapkan target anggaran belanja yang lebih terukur dan rasional memperhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

b. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Tabel 3.6
Penyusunan APBD Tahun 2021-2025

PENYUSUNAN APBD				
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya akan mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD.

d. **Indeks Pengelolaan Aset**

Tabel 3.7
Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021-2025

INDEKS PENGELOLAAN ASET				
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
-	-	-	2,13%	2,22%

Berbeda dari 3 (tiga) tahun sebelumnya mulai tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator tujuan dan sasaran baru sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029 yaitu Indeks Pengelolaan Aset. Namun, penggunaan indikator tersebut sudah dimulai pada tahun 2024. Indeks Pengelolaan Aset pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 2,22% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,13% atau mengalami peningkatan sebesar 103,26%.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021-2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penganggaran yang Baik	- Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan				WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	
			- *Budget Execution* : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belaja Total Dalam APBD	5%	5,23%	94,77	5%	0,05%	99,95	5%	7,17	92,83%	5%	-2,87%	102,87%									
		- Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	73,17	73,17%	100%	94,92	94.92%	100%	88.50	88.50%	100%	99	99%			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.				100%	100%	100%
		- Pelaporan Keuangan yang Baik	- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)				5%	5%	94,63%
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	93	93%	100%	97	97%									
			- *Asset Management*																					
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100	100%	100%	98.07	98.07%	100%	95	95%	100%	99	99%		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,13%	100%	2,15%	2,22%	103,26%
		- Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu																					
Rata-Rata Capaian Kinerja						94,66			98,82			94,89			99,65					100%			99,30

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menegah dalam dokumen Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 3.9 menunjukkan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dibandingkan dengan target akhir renstra. Untuk indikator penetapan dokumen APBD yang tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan. Dengan capaian kemajuan 100%, diharapkan pihak yang berkepentingan (baik eksekutif dan legislatif) untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal. Sedangkan realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD masih terdapat deviasi sebesar 0,37% (5,37%-5%) atau dengan penyerapan anggaran sebesar 94,63%. Selanjutnya, untuk Indeks Pengelolaan Aset sudah melebihi target akhir Renstra yaitu dengan capaian 2,22% atau sudah mencapai 100%.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk memenuhi target akhir Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025			TARGET AKHIR TA. 2029	TINGKAT KEMAJUAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	WTP	Proses Pemyusunan Laporan Keuangan
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	5%	94,63%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	2,22%	103,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30		99,30

Data : Rencana Strategis BPKAD TA 2025-2029, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2025

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam membandingkan realisasi Kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur aspek-aspek yang ditetapkan terhadap Indikator Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di tetapkan 6 (Enam) Dimensi, meliputi : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Pengalokasian Belanja dalam APBD; Transportasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimensi Opini BPK atas LKPD dilakukan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (Tiga) tahun terakhir berturut-turut. Berdasarkan hasil Opini BPK atas LKPD, Maka apabila Pemerintah Daerah memperoleh Opini WTP 3 (Tiga) tahun Terakhir secara berturut-turut akan diberikan skor 1 (100%). Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada **tabel 3.10** dibawah ini.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025			STANDAR NASIONAL
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5			6
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	WTP
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	**Nilai Indeks IPA** 3<IPA≤4 Sangat Baik 2<IPA≤3 Baik 1<IPA≤2 Cukup PA≤1 Buruk

Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.11 dibawah menunjukkan Analisis keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, rata rata capaian kinerja mencapai 99,30%, dengan pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

   Untuk indikator Penetapan Dokumen APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

   BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*).

   Jika dilihat dari kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal bahwa berdasarkan LRA *Unaudited* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 31 Desember 2025 bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp9.690.237.627.574,89 atau 93,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.349.496.422.262,00. Hal ini masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu deviasi sebesar 5%.

   Adapun beberapa faktor yang menjadi kurang optimalnya penyerapan antara lain :

   - Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru dilakukan pada 20 Februari 2025 Hal itu mengakibatkan dalam tiga bulan terakhir kepala daerah fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan RKPD 2026;

- Dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Keterlambatan lelang paket pekerjaan yang disebabkan oleh juknis baru terbit;
- Progres Pekerjaan di lapangan sehingga menyebabkan keterlambatan penagihan;
- Penyesuaian APBD induk dan perubahan APBD tahun 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Langkah-Langkah percepatan penyerapan anggaran seperti :

- Setiap OPD melakukan evaluasi setiap minggu terhadap Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan;
- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa serta memudahkan pelaksanaan Barang dan Jasa sesuai ketetuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- Menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabmya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

c. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berhasil melampaui 100%, yaitu Indeks Pengelolaan Aset dengan capaian 103,26%. Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset berhasil tercapai karena adanya optimalisasi dalam pemeliharaan, pengawasan, pengamanan, pemanfaatan, optimalisasi inventarisir barang milik daerah dengan menerapkan E-BMD, mengadakan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.11 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI 2025			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan		- Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, sangat membantu untuk penyelesaian laporan Keuangan Pemerintah daerah. - Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain : terlambatnya rekonsiliasi dana BOS dari sekolah-sekolah dan aset tetap SKPD sehingga mempengaruhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan.	Selalu Berkoordinasi dan Mendorong OPD untuk melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan.
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.	Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	Jika dilihat dari kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal maka Penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum dapat dikatakan menyentuh angka yang optimal.	- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel. - Memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada masyarakat secara luas.

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI 2025			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisir Barang Milik Daerah	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset idle yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30		

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran) x 100% (sesuai dengan Buku Panduan SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel **3.12** (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran) bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 15,02%. dan **Tabel 3.13** (Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 17,98%.

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=100-10
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-				
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63	7,37
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63	3.087.690.000,00	2.628.196.110,00	85,12	14,88
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19	22,81
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30			84,98	15,02

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**93,96**	**63.122.418.869,00**	**51.682.936.569,00**	**81,88**	18,12
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	100	0,74	100,00	3.234.047.051,00	3.210.017.227,00	99,26	0,74
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	100	27,25	100,00	28.528.648.000,00	20.754.321.734,00	72,75	27,25
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100	22,19	100,00	1.607.369.500,00	1.250.666.142,00	77,81	22,19
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100	5,62	85,00	2.337.450.000,00	2.206.044.842,00	94,38	5,62
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100	6,10	100,00	13.312.690.758,00	12.501.173.212,00	93,90	6,10

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100	37,43	66,67	1.659.745.635,00	1.038.546.666,00	62,57	37,43
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100	16,88	100,00	4.726.337.000,00	3.928.459.140,00	83,12	16,88
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	11,95	100,00	7.716.130.925,00	6.793.707.606,00	88,05	11,95
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan**	**100**	**17,97**	94,87	**3.814.608.754.192,00**	**3.129.090.013.864,30**	**82,03**	**17,97**
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	21,85	21,08	96,48				
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	33,20	34,08	102,65				
			Persentase Penurunan SILPA	2	4,29	214,50				
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Proses Penyusunan Laporan Keuangan					

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	100	7,37	100,00	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63	7,37
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan	100	15,40	100,00	1.740.450.000,00	1.472.445.334,00	84,60	15,40
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100	3,04	100,00	1.728.125.000,00	1.675.576.765,00	96,96	3,04
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	100	29,93	100,00	1.359.565.000,00	952.619.345,00	70,07	29,93
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100	17,99	74,33	3.802.764.114.192,00	3.118.490.198.361,30	82,01	17,99

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**22,81**	**99,17**	**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**	**22,81**
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	1,57%	39,25				
			Asset Management	Ya	Ya	100%				
	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	100	22,81	99,17	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19	22,81
Jumlah : 71 sub kegiatan						**96,00**	**3.883.839.186.169,00**	**3.185.487.708.028,30**	**82,02**	**17,98**

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari Tabel 3.14 dan **Tabel 3.15** dibawah terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam Pencapaian Kinerja pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sudah sesuai Peraturan Perundangan. Berikut beberapa faktor keberhasilan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tepat waktu:

1) Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menyelesaikan APBD tepat waktu;
2) Koordinasi yang efektif antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tim anggaran;
3) Pengajuan APBD yang lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan;
4) Perencanaan anggaran yang baik;
5) Fokus pada prioritas dan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan APBD.

b. **Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD *(Budget Execution)***

Dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD belum optimal atau deviasi sebesar 5,37% dari target yang telah ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%. Untuk itu, pada masa yang akan datang pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan serapan anggaran, antara lain :

1) Melaksanakan pengadaan dini segera setelah KUA/PPAS disepakati, sehingga proyek fisik dan program strategis dapat dimulai lebih awal;
2) Pentingnya monitoring triwulanan untuk mengontrol ritme belanja OPD;
3) Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara berkala, termasuk memberi perhatian khusus pada OPD dengan realisasi rendah;
4) Perencanaan kerja yang realistis, tidak menumpuk pekerjaan pada triwulan IV;

c. Indeks Pengelolaan Aset

Capaian Indikator Pengelolaan Aset tahun 2025 sebesar 2,22% atau mengalami peningkatan sebesar 103,26 dari Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 sebesar 2,13%.

Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan, mulai dari peningkatan sistem informasi keuangan, penguatan mekanisme pengawasan internal, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selanjutnya, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 100%.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4 (empat) indikator yaitu :

1) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 21,06%. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan capaian 33,84% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 33,20%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan.

Terkait pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan :

- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan;
- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan *mandatory spending* seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender.

3) Persentase Penurunan SILPA dengan target 2%. Nilai SILPA tahun 2025 sebesar Rp482.419.609.131,79 mengalami kenaikan sebesar Rp373.924.957.924,43 atau 4,29% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun 2024 sebesar Rp108.494.651.207,36.

   Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih cermat dan rasional proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

   Pemerintah daerah diberi waktu selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Saat ini, dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya, meskipun terdapat kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diharapkan tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada 17 kabupaten/kota, ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator yaitu : Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dan Asset Management.

Nilai Aset Tahun 2024 sebesar Rp37.676.083.177.571,90 mengalami kenaikan sebesar Rp590.284.523.876,99 atau 1,57% dibandingkan dengan Nilai Aset Tahun 2025 sebesar Rp37.676.083.177.571,90.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1) Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.

2) Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan Kanwi ATR-BPN Sumsel. Adapun sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 23 (dua puluh tiga) sertifikat tanah telah diselesaikan.

3) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menertibkan barang tidak bergerak yang bermasalah sebanyak 10 bidang dengan rincian:

Barang	Jumlah	Nilai (RP)
Tanah	10 bidang	427.044.974.561
Jumlah		427.044.974.561

4) Dalam penertiban aset bermasalah, selain berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2025, 20 (dua puluh) aset bermasalah yang diajukan permohonan bantuan melalui mekanisme Permohonan Pendapat Hukum, Surat Kuasa Khusus dan Laporan Pidana.

5) Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

c. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi rata-rata 100%. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**- Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**96,48**	**Menunjang**
						- Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	**102,65**	**Menunjang**
						- Persentase Penurunan SILPA	**164,50**	**Menunjang**
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	94,63%		**- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**Proses Penyusunan Laporan Keuangan**	**Menunjang**
					- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	100%	Menunjang
					- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	100%	Menunjang
					- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100%	Menunjang
					- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	100%	Menunjang
					- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
		2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	97,80%	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	- **Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**39,25%**	Menunjang
						- **Asset Management**	**100%**	
					- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel		Menunjang
				93,96%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**93,96%**	Menunjang
					- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	100%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	100%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
					- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	85%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	Menunjang
					- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100%	Menunjang
					- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100%	Menunjang
					- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	Menunjang

Tabel 3.15
Analisis Penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**Opini BPK atas Laporan Keuangan**			**WTP**	**Belum ada Opini atas Laporan Keuangan**	**-**				
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	***Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan***				**7.016.500.000,00**	**6.499.174.059,00**	**92,63**	
					- Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	21,85	21,08	96,48				Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
					- Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	33,20	34,08	102,65				
					- Persentase Penurunan SILPA	2	4,29	214,50				Bidang Perbendaharaan Daerah
					- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	-	Proses Penyusunan Laporan Keuangan				Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- **Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.**	***Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending***	***100%***	***100%***	***100%***	***7.016.500.000,00***	***6.499.174.059,00***	**92,63**	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	375.000.000,00	338.883.390,00	90,37	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	400.000.000,00	363.039.074,00	90,76	
				- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	340.000.000,00	338.829.200,00	99,66	
				- Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	190.000.000,00	184.088.539,00	96,89	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	1.330.000.000,00	1.271.289.098,00	95,59	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	1.195.000.000,00	971.166.438,00	81,27	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.186.500.000,00	3.031.878.320,00	95,15	

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- **Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)**			**5%**	**5,37%**	**94,63**	**3.087.690.000,00**	**2.628.196.110,00**	**85,12**	
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	***Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi***	***100%***	***100%***	***100%***	**1.728.125.000,00**	**1.675.576.765,00**	96,96	Bidang Perbendaharaan Daerah
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	577.125.000,00	572.428.170,00	99,19	
				- Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	245.000.000,00	229.209.000,00	93,55	
				- Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	359.000.000,00	345.805.245,00	96,32	
				- Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen	538 Dokumen	100%	547.000.000,00	528.134.350,00	96,55	

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	***Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD***	***100%***	***100%***	***100%***	**1.359.565.000,00**	**952.619.345,00**	**70,07**	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
				- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	475.000.000,00	318.582.430,00	67,07	
				- Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	349.300.000,00	163.213.415,00	46,73	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	535.265.000,00	470.823.500,00	87,96	
		2. Meningkatnya Kualitas	- **Indeks Pengelolaan Aset**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**	Bidang Pengelolaan BMD
					- Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	1,57%	39,25				
					- Asset Management	Ya	Ya	100%				

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	***Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD***	***100%***	***100%***	***100%***	**1.359.565.000,00**	**952.619.345,00**	**70,07**	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
				- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	475.000.000,00	318.582.430,00	67,07	
				- Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	349.300.000,00	163.213.415,00	46,73	
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	535.265.000,00	470.823.500,00	87,96	
		2. Meningkatnya Kualitas	- **Indeks Pengelolaan Aset**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**	Bidang Pengelolaan BMD
					- Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	1,57%	39,25				
					- Asset Management	Ya	Ya	100%				

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Keterangan
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		***100%***	***99,17%***	***99,17%***	***6.108.013.108,00***	***4.714.757.595,00***	***77,19***	
				- Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	475.000.000,00	463.772.500,00	97,64	
				- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	41 Dokumen	102,50%	65.000.000,00	62.941.950,00	96,83	
				- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan	53 Laporan	100%	522.700.000,00	516.743.999,00	98,86	
				- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan	17 Laporan	100%	1.660.000.000,00	908.350.034,00	54,72	
				- Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan	50 Laporan	100%	290.000.000,00	236.013.232,00	81,38	
				- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	100%	1.000.000.000,00	683.152.180,00	68,32	
				- Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen	51 Dokumen	100%	945.000.000,00	709.228.612,00	75,05	
				- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%	710.313.108,00	696.409.388,00	98,04	
				- Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%	440.000.000,00	438.145.700,00	99,58	
				Rata-Rata Capaian Kinerja				**99,30**	**16.212.203.108,00**	**13.842.127.764,00**	**84,98**	

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja yaitu mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dengan total anggaran sebesar Rp7.016.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.499.174.059,00 atau 92,63% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00 terealisasi sebesar Rp338.883.390,00 atau 90,37%.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp363.039.074,00 atau 90,76%.

Sub Kegiatan sebagaimana disebutkan pada **nomor 1 dan nomor 2** diatas merupakan Fondasi awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang krusial untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dokumen ini memastikan perencanaan anggaran selaras dengan aturan, realistis, dan transparan. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada RPJMD. Proses koordinasi yang baik memastikan tidak ada program fiktif atau kegiatan yang tidak didukung dokumen perencanaan. PPAS memberikan batas maksimal anggaran untuk setiap kegiatan, mencegah "pemborosan" atau penganggaran yang tidak terukur yang sering menjadi temuan BPK.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp340.000.000,00 terealisasi sebesar Rp338.829.200,00 atau 99,66%.
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 terealisasi sebesar Rp184.088.539,00 atau 96,89%.

Sub Kegiatan sebagaimana disebutkan pada **nomor 3 dan nomor 4** diatas untuk memastikan RKA selaras dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS. BPK menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika anggaran tidak memiliki dasar perencanaan yang kuat, hal ini dianggap sebagai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Sub kegiatan ini adalah hal utama dalam siklus akuntansi daerah. Jika penyusunan dan verifikasi RKA dilakukan dengan benar, maka potensi salah saji material dalam laporan keuangan dapat ditekan seminimal mungkin.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp1.330.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.271.289.098,00 atau 95,59%.

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.195.000.000,00 terealisasi sebesar Rp971.166.438,00 atau 81,27%.

Sub Kegiatan sebagaimana disebutkan pada **nomor 5 dan nomor 6** diatas merupakan hal utama dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika Perda APBD dan Perkada Penjabaran ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin.

7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp3.186.500.000,00 terealisasi sebesar Rp3.031.878.320,00 atau 95,15%.

   Sub Kegiatan ini fondasi hukum (regulasi) yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah memiliki standar yang baku dan sesuai dengan aturan terbaru. BPK akan memberikan opini buruk jika daerah masih menggunakan acuan hukum yang sudah kadaluwarsa, karena hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan.

d. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp1.728.125.000,00 dengan realisasi sebesar 1.675.576.765,00 atau 96,96% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp577.125.000,00 terealisasi sebesar Rp572.428.170,00 atau 99,19%.

   Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD memverifikasi bahwa setiap pengeluaran kas (penerbitan SP2D) didasarkan pada dokumen pendukung yang lengkap dan sah, serta untuk memastikan bahwa Kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca adalah nyata (*existence*), akurat nilainya (*accuracy*), dan dimiliki secara sah (*rights*) oleh pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dianggarkan sebesar Rp245.000.000,00 terealisasi sebesar Rp229.209.000,00 atau 93,55%.

   Sub-kegiatan ini menjaga agar dana transfer dikelola tanpa cacat administratif. Hal ini memastikan aspek Kepatuhan dan Penyajian Wajar dalam laporan keuangan tetap terjaga sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dianggarkan sebesar Rp359.000.000,00 terealisasi sebesar Rp345.805.245,00 atau 96,32%.

Sub-kegiatan ini berdampak langsung pada penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Implementasi transaksi non-tunai meminimalisir penggunaan uang fisik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan sebesar Rp547.000.000,00 terealisasi sebesar Rp528.134.350,00 atau 96,55%.

   Sub-kegiatan ini merupakan salah satu prosedur pengendalian intern (SPI) paling penting di BPKAD untuk memastikan laporan keuangan daerah bebas dari salah saji material. Opini WTP sangat bergantung pada kekuatan SPI. Semakin rutin rekonsiliasi dilakukan, semakin kecil risiko kecurangan (*fraud*) atau kehilangan uang daerah yang tidak terdeteksi.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp1.359.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp952.619.345,00 atau 70,07% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00 terealisasi sebesar Rp318.582.430,00 atau 67,07%.

   Dalam audit BPK, Sub kegiatan ini adalah penentu utama apakah laporan keuangan layak menyandang opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sub kegiatan ini juga untuk menghindari ketidaksinkronan data antar-laporan yang sering menjadi temuan audit. Rekonsiliasi memastikan seluruh laporan menyajikan angka yang logis dan saling terhubung. BPK memerlukan penjelasan memadai atas setiap kenaikan atau penurunan akun yang signifikan. Verifikasi yang kuat memberikan basis data yang valid untuk narasi di CaLK.

2. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp349.300.000,00 terealisasi sebesar Rp163.213.415,00 atau 46,73%.

   Sub kegiatan konsolidasi adalah proses akumulasi dan validasi akhir. Jika BPKAD sukses mengonsolidasi laporan dari SKPD dan BLUD dengan akurat, maka LKPD yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya (wajar), sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp535.265.000,00 terealisasi sebesar Rp470.823.500,00 atau 87,96%.

Dalam siklus akuntansi daerah, sub-kegiatan ini merupakan akhir dari seluruh proses pelaporan keuangan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban ini adalah penentu apakah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK dapat dipertahankan. Sub kegiatan ini adalah proses formalisasi hukum atas laporan keuangan yang telah diaudit. Jika BPKAD mampu menyusun draf regulasi ini dengan akurat, tepat waktu, dan selaras dengan hasil audit BPK, maka opini WTP akan terjaga secara administratif dan hukum.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp6.108.013.108,00 dengan realisasi sebesar Rp4.714.757.595,00 atau 77,19% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00 terealisasi sebesar Rp463.772.500,00 atau 97,64%.

   Sub kegiatan ini memastikan setiap belanja memiliki "patokan harga" yang sah, sehingga laporan keuangan di akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp62.941.950,00 atau 96,83%.

   RKBMD adalah titik nol akuntabilitas aset tetap. Jika penyusunannya tertib dan sesuai regulasi, maka seluruh siklus pengadaan, penatausahaan, hingga pelaporan aset akan terjaga integritasnya, sehingga opini WTP dapat dipertahankan

3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp522.700.000,00 terealisasi sebesar Rp516.743.999,00 atau 98,86%.

   Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam audit BPK, penatausahaan yang tertib adalah syarat mutlak untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena aset tetap seringkali menjadi akun dengan nilai material terbesar di Neraca

4. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp1.660.000.000,00 terealisasi sebesar Rp908.350.034,00 atau 54,72%.

   Pengamanan BMD memastikan bahwa aset daerah yang bernilai milyaran rupiah tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi juga aman secara fisik dan sah secara hukum. Dengan pengamanan yang optimal, risiko temuan audit terkait aset tetap dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga opini **WTP** dapat diraih secara konsisten.

5. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp290.000.000,00 terealisasi sebesar Rp236.013.232,00 atau 81,38%.

   Sub-kegiatan **ini** merupakan proses penentuan nilai objektif atas aset daerah untuk memastikan angka yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan nilai wajar, serta memastikan bahwa **nilai** aset yang bernilai material di Neraca didasarkan pada metodologi penilaian yang sah dan profesional.

6. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp683.152.180,00 atau 68.32%.

   Sub Kegiatan ini untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola sesuai aturan dan fisik asetnya benar-benar ada, memastikan SKPD disiplin dalam melakukan rekonsiliasi internal antara kartu barang (KIB) dengan catatan akuntansi. Selain itu, memastikan bahwa aset tetap yang biasanya merupakan akun bernilai terbesar di Neraca dikelola dengan transparan, akuntabel, dan patuh hukum. Jika pengawasan lemah, aset menjadi titik yang paling mudah tidak memperoleh opini WTP.

7. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp945.000.000,00 terealisasi sebesar Rp709.228.612,00 atau 75,05%.

   Sub-kegiatan ini memastikan bahwa siklus hidup aset (dari penggunaan hingga penghapusan) terdokumentasi secara hukum dan akuntansi. Hal ini menjamin prinsip Penyajian Wajar di Neraca dan Laporan Operasional, sehingga opini WTP dapat dipertahankan

8. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp710.313.108,00 terealisasi sebesar Rp696.409.388,00 atau 98,04%.

   Tanpa rekonsiliasi yang tertib, laporan aset daerah rentan terhadap ketidakakuratan yang dapat meruntuhkan opini WTP. Melalui sub-kegiatan ini, BPKAD memastikan prinsip "Tertib Fisik, Tertib Hukum, dan Tertib Administrasi" terpenuhi sehingga laporan keuangan daerah dianggap andal oleh auditor.

9. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00 terealisasi sebesar Rp438.145.700,00 atau 99,58%.

   Sub-kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tahap finalisasi data aset yang akan disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat aset tetap biasanya merupakan akun dengan nilai paling material di laporan keuangan, sub kegiatan ini menjadi kunci utama BPKAD dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan **tabel 3.15 dibawah**, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 82,02%, tertinggi pada realisasi anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 99,26% sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi sebesar 62,57% sehingga secara akumulatif terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp698.351.478.140,70 atau 17,98%.

Berkenaan dengan rendahnya serapan pada beberapa kegiatan, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi Rp1.038.546.666,00 atau 62,57%, terdapat efisiensi sebesar Rp621.198.969,00. Hal ini disebabkan antaralain adanya rencana pengadaan mebel di gedung kantor baru, namun gedung kantor belum dibangun;

b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian realisasi Rp952.619.345,00 atau 70,07%, terdapat efisiensi sebesar Rp406.945.655,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja;

c. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi Rp4.714.757.595,00 atau 77,19%, terdapat efisiensi sebesar Rp406.945.655,00. Hal ini disebabkan :

    1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.660.000.000,00 atau 54,72%.

        Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim penertiban aset pemprov. sumsel, terdiri dari tim Pemprov sumsel (BPKAD, ITDA, Biro Hukum & Sat Pol PP) Tim POLDA Sumsel dan Tim Kejati Sumsel (yang diberikan honor sesuai SBU), namun tahun 2025 Tim Penertiban Aset tidak jadi dibentuk

    2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi sebesar Rp683.152.180,00 atau 68,32%.

        - Pada saat penyusunan anggaran, dianggarkan biaya pengukuran dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel, namun sesuai dengan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Permen ATR/BPN No. 25 Tahun 2016 bahwa untuk pelayanan pertanahan, pengukuran, pemetaan, dan pemerikaan oleh panitia A dikenakan tarif Rp. 0,00 untuk Instansi dan Pemda, pengukuran tanah yang berbayar untuk balik nama sertifikat;

- Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim pengawasan pengendalian BMD Pemprov. Sumsel yang telah dilakukan kontrak pemanfaatan, terdiri dari tim Pemprov sumsel (BPKAD, ITDA, Biro Hukum, PERKIM dan Satpol PP) (yang diberikan honor sesuai SBU), namun tahun 2025 Tim Penertiban Aset tidak jadi dibentuk.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian realisasi Rp1.212.325.842.150,30 atau 70,26%, terdapat efisiensi sebesar Rp513.212.814.484,70, hal ini disebabkan oleh adanya Belanja Bantuan Gubernur yang belum disalurkan karena Kemampuan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan capaian realisasi Rp33.448.110,00 atau 0,11%, terdapat efisiensi sebesar Rp29.111.069.070,00, alokasi ini merupakan penyediaan anggaran dalam rangka penanganan tanggap darurat akibat bencana alam.

Tabel 3.15
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	*2*		*7*	*8*	*9*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**63.122.418.869,00**	**51.682.936.569,00**	**81,88**
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.234.047.051,00	3.210.017.227,00	99,26
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.528.648.000,00	20.754.321.734,00	72,75
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.607.369.500,00	1.250.666.142,00	77,81
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.337.450.000,00	2.206.044.842,00	94,38
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.312.690.758,00	12.501.173.212,00	93,90
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.659.745.635,00	1.038.546.666,00	62,57
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.726.337.000,00	3.928.459.140,00	83,12
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.716.130.925,00	6.793.707.606,00	88,05
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**3.814.608.754.192,00**	**3.129.090.013.864,30**	**82,03**
	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.740.450.000,00	1.472.445.334,00	84,60
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.728.125.000,00	1.675.576.765,00	96,96
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.359.565.000,00	952.619.345,00	70,07
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.802.764.114.192,00	3.118.490.198.361,30	82,01
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**
	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19
Jumlah : 71 sub kegiatan			**3.883.839.186.169,00**	**3.185.487.708.028,30**	**82,02**

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

3.3 Upaya Perbaikan terkait Perjanjian Kinerja pada masa yang akan datang

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Upaya perbaikan untuk memastikan Penetapan Dokumen APBD Tepat Waktu (sebelum 31 Desember) sangat penting dalam mempertahankan opini WTP, karena keterlambatan sering dianggap sebagai kelemahan serius dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). Upaya perbaikan tersebut meliputi :

1. Mengoptimalkan penggunaan **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)** untuk mengunci jadwal (tahapan) secara otomatis.

   Memastikan seluruh data input dari SKPD dilakukan sebelum batas waktu sistem ditutup (*deadline locking system*) yang bertujuan menghindari penundaan akibat proses input manual atau perubahan anggaran di luar jadwal yang telah disepakati.

2. Penguatan Fungsi TAPD dalam *Time Management*

   Menyusun Kalender Anggaran yang menetapkan target penyampaian KUA-PPAS dan Raperda APBD kepada DPRD yang bertujuan memberikan ruang waktu untuk proses pembahasan dengan DPRD dan evaluasi oleh Kemendagri.

3. Komunikasi Intensif dan Pra Pembahasan dengan DPRD

   Melakukan **Pra-pembahasan** informal atau konsultasi rutin dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum dokumen resmi diserahkan yang bertujuan menyelaraskan persepsi terkait program prioritas dan kemampuan fiskal daerah sehingga meminimalisir perdebatan yang berkepanjangan saat sidang resmi.

4. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

   Proses evaluasi oleh Kemendagri sering memakan waktu jika banyak catatan oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak guna percepatan tindak lanjut hasil evaluasi sehingga penetapan Perda APBD tidak terhambat oleh hambatan administratif pasca evaluasi.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD *(Budget Execution)*

Upaya perbaikan deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution) oleh BPKAD, yang krusial untuk pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, berfokus pada **percepatan penyerapan anggaran secara konsisten sepanjang tahun** agar tidak menumpuk di akhir tahun (akhir tahun anggaran) dan mengurangi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Berikut adalah langkah-langkah perbaikan strategis guna mempertahankan WTP untuk memastikan deviasi belanja tetap rendah melalui:

1. Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan mendorong OPD menyusun Anggaran Kas yang mencerminkan jadwal riil pelaksanaan kegiatan untuk memperkecil selisih (deviasi) antara rencana dan realisasi.
2. Memastikan perencanaan belanja barang dan belanja modal sesuai dengan target penyerapan, terutama untuk kegiatan fisik yang berisiko lelang terlambat.
3. Penggunaan e-katalog untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tanpa tender, sehingga mempercepat serapan anggaran.
4. Mengadakan rekonsiliasi data belanja antara BPKAD dan OPD secara rutin untuk memastikan akurasi data penyerapan.

Dengan memperkecil deviasi, pemerintah daerah menunjukkan perencanaan yang baik, yang merupakan salah satu poin dalam penilaian WTP.

c. Indeks Pengelolaan Aset

Upaya perbaikan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam rangka mencapai atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK difokuskan pada peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tertib administrasi, fisik, dan hukum. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan pengelolaan aset untuk mendukung WTP :

1. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset (inventarisasi) secara berkala dan akurat untuk memastikan seluruh aset tercatat dalam laporan keuangan.
2. Melakukan penyesuaian nilai tercatat aset tetap ke nilai wajar (revaluasi) untuk memastikan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai yang akurat.
3. Mengamankan aset fisik melalui sertifikasi tanah dan pengamanan hukum aset lainnya untuk menghindari sengketa yang dapat mempengaruhi opini WTP.
4. Menggunakan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mendokumentasikan mutasi aset, hibah, dan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
5. Memaksimalkan penggunaan aset tetap agar memberikan nilai tambah dan meminimalisir *idle asset.*
6. Menerapkan metode penyusutan (misalnya garis lurus) secara tepat untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset dalam laporan keuangan.
7. Melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan pendampingan tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan aset.

3.4 Keterkaitan LKJiP dan SKP Individu BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Keterkaitan Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu (Cascading Kinerja)

Sebagai wujud pemenuhan prinsip akuntabilitas yang terintegrasi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa seluruh target kinerja strategis organisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang secara oleh kinerja individu aparatur. Penyelarasan (*cascading*) indikator kinerja organisasi ke tingkat individu dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Proses cascading ini dijembatani melalui penyusunan Matriks Pembagian Peran dan Hasil. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPKAD didistribusikan secara berjenjang menjadi rencana kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai / SKP) bagi Pejabat Administrator (Kepala Bidang), Pejabat Pengawas/Subkoordinator (Kepala Subbidang, hingga Pelaksana (Staf). Dengan demikian, setiap pencapaian target makro pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam LKjIP ini merupakan hasil akumulasi langsung dari kontribusi kerja harian pegawai secara terstruktur.

Matriks Cascading IKU BPKAD ke SKP Individu Pegawai

Jenjang Jabatan	Pemilik Kinerja	Rencana Kinerja (SKP) & Indikator Kinerja Individu (IKI)	Target dan Realisasi	Keterkaitan dengan Dokumen LKjIP
JPT Pratama (Eselon II)	Kepala BPKAD	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Indikator : Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Target : WTP Realisas i: WTP	Merupakan IKU Utama BPKAD tingkat daerah yang dilaporkan secara makro pada Bab III LKjIP.
Administrator (Eselon III)	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Indikator : Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Target : 100% Realisasi : 100%	Menjamin tidak adanya salah saji material dalam LKPD demi mempertahankan opini WTP Kepala BPKAD.
Pengawas /Subkoor (Eselon IV)	Kasubbid Akuntansi II (Konsolidasi Laporan Keuangan)	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP Indikator : Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	Target : 100% Realisasi : 100%	Menjadi basis data validasi pelaporan agar proses kompilasi laporan keuangan oleh Kabid berjalan tepat waktu.
Pelaksana (Staf)	Staf Akuntansi	Melakukan verifikasi dan penginputan data jurnal penyesuaian. Indikator: Tingkat akurasi pemrosesan draf jurnal koreksi pembukuan.	Target : 100% Realisasi : 100%	Menjadi hulu akurasi data transaksi harian, sehingga meminimalisir temuan administratif oleh auditor BPK

Berdasarkan matriks cascading di atas, capaian indikator makro BPKAD yang tertuang di dalam dokumen LKjIP ini khususnya keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

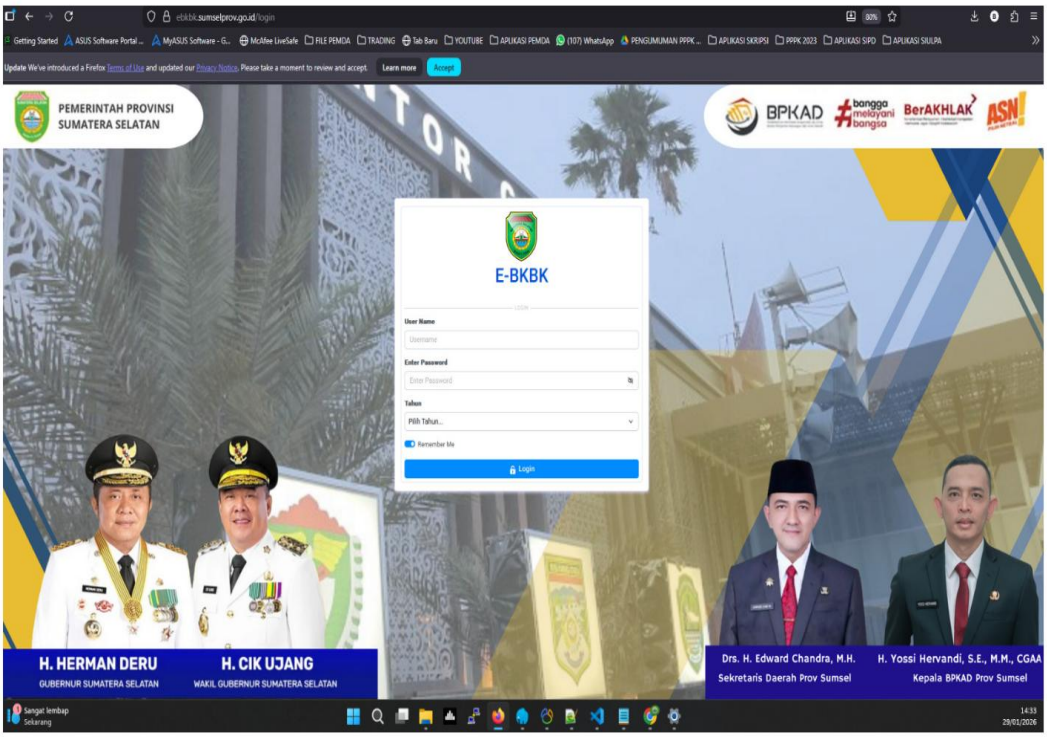
WTP merupakan efektivitas capaian SKP di level individu pegawai. Opini WTP yang diraih Kepala BPKAD merupakan dampak langsung dari andalnya laporan keuangan yang disusun oleh Bidang Akuntansi (realisasi kesesuaian SAP 100%). Keandalan tersebut bermula dari disiplinnya tingkat Kasubbid dalam melakukan rekonsiliasi data bulanan (12 Dokumen Berita Acara), serta tingkat akurasi verifikasi jurnal transaksi oleh staf pelaksana akuntansi yang mencapai 100%. Dengan demikian, keterkaitan antara LKjIP dengan capaian kinerja SKP pada setiap jenjang jabatan di lingkungan BPKAD. Keberhasilan BPKAD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada tahun ini merupakan akumulasi nyata dari hasil penilaian SKP seluruh pegawai yang mayoritas berada pada predikat kinerja Baik.

3.5 Inovasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa inovasi :

a. Aplikasi SIAP SUMSEL guna peningkatan tata kelola barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

b. Aplikasi E-BKBK merupakan pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan secara terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



3.4 Penghargaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya dalam urusan penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, diantaranya melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaporkannya dalam bentu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sepuluh sejak tahun 2014.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meraih :

Penghargaan "SLIP PPID AWARD" Tahun 2025 Kategori Cukup Baik



Penghargaan Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Harapan II



Penghargaan Kategori Organisasi Perangkat Daerah dengan Kualifikasi Informatif dengan nilai 96,92 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dada Badan Publik Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
NOMOR : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	96,92	Informatif
2	Dinas Kesehatan	95,99	Informatif
3	Sekretariat DPRD	91,32	Informatif
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	91	Informatif
5	INSPEKTORAT Prov. Sumsel	82	Menuju Informatif
6	Dinas Pendidikan	82	Menuju Informatif
7	Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	81,84	Menuju Informatif

12. KATEGORI BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BPN Kab. PALI	90,90	Informatif
2	BPN Kota Prabumulih	90,52	Informatif
3	BPN Kab. Lahat	88,12	Menuju Informatif
4	BPN Kota Pagar Alam	87,54	Menuju Informatif
5	BPN Kota Lubuk Linggau	55,01	Kurang Informatif
6	BPN Kab. Empat Lawang	54,95	Kurang Informatif
7	BPN Kab. Ogan Komering Ilir	49,76	Kurang Informatif
8	BPN Kab. Ogan Ilir	44,86	Kurang Informatif
9	BPN Kab. Ogan Komering Ulu	27,50	Tidak Informatif
10	BPN Kab. Muara Enim	27,50	Tidak Informatif
11	BPN Kab. Banyuasin	27,50	Tidak Informatif
12	BPN Kota Palembang	27,50	Tidak Informatif
13	BPN Kab. OKU Selatan	25,93	Tidak Informatif
14	BPN Kab. OKU Timur	17,35	Tidak Informatif
15	BPN Kab. Musi Rawas Utara	16,83	Tidak Informatif
16	BPN Kab. Musi Rawas	13,33	Tidak Informatif
17	BPN Kab. Musi Banyuasin	13,33	Tidak Informatif

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

JOEMARTHINE CHANDRA, SH., MH